

**PENTINGNYA MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* GUNA
MENINGKATKAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN *GO PUBLIC* (NON
KEUANGAN) YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Manajemen



Oleh:

RIZKIYATIL HOLISHAH
NIM: 2017210185

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
S U R A B A Y A
2021**

PERSETUJUAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Rizkiyatil Holishah
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 22 juli 1999
NIM : 2017210185
Program Studi : Manajemen
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Manajemen Keuangan
Judul : Pentingnya Mekanisme *Good Corporate Governance* Guna Meningkatkan Profitabilitas Perusahaan *Go Public* (non keuangan) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing
Tanggal :

Ketua Program Studi Sarjana Manajemen
Tanggal:

(Dr. Dra. Ec. Wiwik Lestari, M.Si)
NIDN : 0705056502

(Burhanudin, S.E.,M.Si.,PH.D)
NIDN : 0719047701



**THE IMPORTANCE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE MECHANISMS TO
IMPROVE THE PROFITABILITY OF GO PUBLIC (NON-FINANCIAL)
COMPANIES REGISTERED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE**

Rizkiyatil Holishah

STIE Perbanas Surabaya

Email : 2017210185@students.perbanas.ac.id

Ds. Tunggak Jati RT 003/001, Pamolokan-Sumenep

ABSTRACT

The purpose of this study is Managerial Ownership, Institutional Ownership, the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Audit Committee on Profitability (ROA) in Go Public (non-financial) companies. Sample The population in this study were 46 companies. The variable of managerial ownership uses the proportion of ownership of the number of managerial shares, the variable of institutional ownership uses the proportion of ownership of the number of institutional shares, the variable of the board of directors uses the number of members who are directors in the company, the variable of the board of commissioners uses the number of members who are commissioners in the company, and the audit committee uses the number of members who become audits in the company. This type of research uses secondary research and in the form of data collection documentation. The analysis used is multiple linear regression analysis consisting of several simultaneous tests (F test) and partial tests (t test). The results showed that KM, KI, DD, DK, and KA simultaneously did not have a significant effect on ROA in publicly traded (non-financial) companies.

Keyword : *Return On Asset (ROA), Managerial Ownership, Institutional Ownership, Board of Directors, Board of Commissioners, Audit Committee.*

PENDAHULUAN

IICG (*the Indonesian institute for corporate governance*) mendefinisikan bahwa *good corporate* adalah serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Munculnya *corporate governance* dapat dikatakan dilatarbelakangi dari berbagai skandal besar yang terjadi pada perusahaan-perusahaan baik di Inggris maupun Amerika Serikat pada tahun 1980an dikarenakan tindakan yang cenderung serakah dan mementingkan tujuan pihak-pihak tertentu saja.

Di Era Globalisasi perusahaan di Indonesia semakin berkembang pesat, sehingga mau tidak mau perusahaan harus lebih efisien dan lebih selektif dalam melakukan aktivitas operasionalnya agar

apa yang menjadi tujuan perusahaan terwujudkan. Agar perusahaan mampu mencapai tujuannya maka perusahaan harus mampu mensejahterakan para pemegang saham, dan *Corporate Governance* yang baik perlu diterapkan. Dan juga perusahaan dituntut untuk bersaing terlihat dari banyak ya perusahaan-perusahaan yang sejenis yang dimana berbagai perusahaan masing-masing mempunyai visi-misi yang berbeda-beda. David, dan Wilopo (2011) makna *Corporate Governance* Sistem adalah merupakan konsep yang diajukan guna peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen serta menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. *Corporate governance* memberikan perlindungan efektif bagi *stockholder* dan *stakeholder* sehingga mereka akan yakin

memperoleh imbal hasil atas investasinya dengan benar. Menurut Mukhtaruddin, Ubaidillah, Dewi, Hakiki, dan Nopriyanto (2019) "*Corporate Governance implementation will consistently strengthen the company's competitive position, maximize firm value, manage resources and risks more efficiently and effectively, which finally will strengthen the trust of shareholders and stakeholders, so they can operate and grow sustainably.*" yang artinya penerapan *Good Corporate Governance* harus maksimal agar dapat mengelolah sumber daya dan risiko dengan lebih efisien yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan pemilik perusahaan dan pemegang saham. Sebab apabila *Good Corporate Governance* dilaksanakan dengan baik maka nilai perusahaan yang diperoleh akan baik pula dan itu dapat memaksimalkan profitabilitas perusahaan.

David dan Wilopo (2011), menyatakan ada beberapa prinsip dasar berkaitan dengan *Good Corporate Governance* yang harus diperhatikan, yaitu: *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness*. Transparansi (*Transparency*) perusahaan harus mampu obyektivitas secara baik dalam menjalankan bisnis perusahaan, serta secara terbuka dalam menyampaikan informasi perusahaan secara relevan dan informasi tersebut dapat mudah di akses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengungkapkan masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas (*Accountability*) Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang

diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. *Responsibilitas (Responsibility)* perusahaan harus mampu mematuhi perundang-undangan, melaksanakan tanggung jawab, serta dapat menciptakan kesinambungan usaha dalam jangka panjang. (*Independency*) Untuk memaksimalkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governance*, perusahaan harus menata secara independent sehingga tiap organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat di campur tangankan oleh pihak lain. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*) Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Guna mencapai tata Kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* dengan baik yang nantinya akan berpengaruh dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROA, maka dibutuhkan pihak-pihak atau kelompok yang mengawasi implementasi dari kebijakan direksi yang meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan direksi dan komisaris, dan komite audit. Menurut Abdul Azis (2017), kepemilikan institusional dapat mengatasi masalah keagenan (*agency conflict*) yang terjadi pada manajer dengan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dapat dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang di ambil oleh manajemen, maka manajer harus dapat melindungi hak-hak investor dan akan senantiasa semua kerugian apabila perusahaan melakukan kecurangan, maka dari itu agar tidak terjadi kecurangan kepemilikan manajerial yang di monitoring oleh manajemen harus mempunyai penuh tanggung jawab yang akan berdampak pada meningkatnya profitabilitas yang diukur dengan *Return On Asset (ROA)*.

Kemudian peran dewan komisaris independen untuk mengawasi direksi perusahaan dalam mencapai kinerja perusahaan. Menurut Abdul Azis (2017), dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keluarga maupun bisnis dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris dan dewan direksi dengan perusahaan itu sendiri adalah komisaris independent. Sebagai penyelenggara pengendalian internal perusahaan, dewan komisaris yang efektif dapat meningkatkan kinerja manajemen dalam perusahaan yang nantinya dapat berdampak pada meningkatkan profitabilitas perusahaan. Menurut peraturan (Otoritas Jasa Keuangan, 2014) Nomor 33/Pojk.04/2014 dewan direksi adalah organ emiten atau perusahaan public yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan emiten atau perusahaan public, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Dimana dewan direksi ini mempunyai hak untuk mewakili emiten perusahaan baik di dalam maupun di luar pengendalian sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang berlaku, dewan direksi di dalam perusahaan akan menentukan kebijakan yang diambil atau strategi perusahaan secara jangka Panjang maupun jangka pendek sehingga akan berpengaruh pada meningkatnya profitabilitas perusahaan.

Keberadaan komite audit mempunyai peran penting dalam menjamin terciptanya tata Kelola perusahaan yang baik, komite audit mampu mengurangi praktek manipulasi dan kecurangan dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka control terhadap perusahaan akan lebih baik pula, sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Menurut Menurut Abdul Azis (2017), keberadaan komite audit akan meningkatkan fungsi pengawasan laporan keuangan yang disajikan dalam suatu perusahaan dan kemungkinan terjadinya

asymmetric information akan lebih kecil dan nantinya akan berdampak terhadap meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Teori yang membahas mengenai pemisahan kepemilikan perusahaan dan pengelolaan yaitu *agency theory* dimana terdapat pemisahan kepemilikan dapat menimbulkan konflik keagenan, yang disebut *Agency problem*. Terjadinya konflik tersebut disebabkan adanya perbedaan kepentingan yang bertentangan diantara pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Cara untuk meminimumkan konflik keagenan tersebut, maka perusahaan perlu menerapkan mekanisme *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governan* ini membantu terciptanya hubungan yang kondusif serta dapat dipertanggung jawabkan diantaranya elemen dalam perusahaan (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial. Dewan komisaris, dewan direksi direksi, dan komite audit) dalam rangka peningkatan profitabilitas perusahaan.

Penelitian ini mengukur *Good Corporate Governance* dengan menggunakan lima pengukuran yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, Dewan komisari, dewan direksi, dan komite audit. Dewan komisaris yaitu sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dan memastikan bahwa perusahaan tersebut melaksanakan *Good Corporate Governance*. Keberhasilan perusahaan dalam menerapkan *Good Corporate Governance* yang baik dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Penelitian ini menguji hubungan antara *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA.

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Landasan teori merupakan teori dasar yang digunakan dalam sebuah

penelitian, dalam penelitian ini yang digunakan sebagai landasan teori adalah konsep dasar mengenai *Good Corporate Governance* faktor-faktor yang mempengaruhi *Good Corporate Governance*, serta teori yang dikemukakan oleh para ahli.

Agency Theory (Teori Keagenan)

Teori keagenan (*Agency Theory*) adalah suatu teori dimana timbul akibat adanya hubungan antara pemilik (*stakeholder*) dengan pengelola (manajer) di dalam suatu organisasi, dan manajemen merupakan pihak yang telah dikontrak oleh pemegang saham agar bekerja demi kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu pihak manajemen harus bertanggung jawab atas semua pekerjaan kepada pemegang saham. Teori keuangan sebelumnya tahun 1976 memakai model ekonomi standar untuk menggambarkan perilaku perusahaan, dalam hal ini hubungan *agent-principal*, pihak *agent* memanfaatkan kesempatan pada hubungan pemegang saham (*principal*) dengan pemberi pinjaman (*principal*), serta pihak pemegang saham yang mengambil kesempatan dalam hubungan tersebut.

Teori keagenan (*Agency Theory*) ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan Pertama adalah masalah keagenan yang timbul pada saat (a) keinginan – keinginan atau tujuan dari prinsipal dan agen berlawanan (b) suatu hal yang sulit atau mahal bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar benar dilakukan oleh agen. Kedua, adalah masalah pembagian resiko yang timbul pada saat *principal* dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap resiko.

Agency problem bahwa pada perusahaan besar sangat potensial terjadi karena proporsi kepemilikan perusahaan oleh manajer relatif kecil, sehingga manajer bukan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham tetapi memperbesar skala perusahaan dengan

cara ekspansi atau membeli perusahaan lain.

Biaya agensi yang akan timbul akibat konflik kepentingan umum pengelola perusahaan (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*) berpotensi mengakibatkan jenis biaya agensi sebagai berikut:

1. Biaya akibat ketidakstabilan dalam pengelolaan yang dilakukan oleh pihak *agent*.
2. Biaya yang timbul akibat pilihan proyek yang tidak sama dengan pilihan yang dilakukan oleh pemegang saham karna risiko kerugian tinggi.
3. Biaya yang timbul karena dilakukannya Batasan-batasan untuk kegiatan *agent* oleh pihak *principal* (*bonding cost*).

Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *Good Corporate Governance*. Teori keagenan menjelaskan hubungan yang asimetri antara *agen* dan *principal*, untuk menghindari terjadinya hubungan asimetri tersebut dibutuhkan suatu konsep *Good Corporate Governance* yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi perusahaan yang sehat.

Good Corporate Governance

a. Pengertian *Good corporate governance*

Good corporate governance didefinisikan sebagai suatu system pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamatan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Menurut Fatimah, Mardani, Wahono (2019) *Good corporate governance* adalah yang mengatur hubungan antara pengurus perusahaan, pemegang saham, pihak kreditur, pemerintahan, karyawan, dan pemegang kepentingan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan

mengendalikan suatu perusahaan. *Corporate governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer. Mekanisme GCG diukur dengan menggunakan indikator kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit independen, dan kepemilikan institusional. Adapun tujuan penerapan *good corporate governance* suatu perusahaan adalah sebagai berikut: 1) mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan. 2) mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien. 3) meningkatkan disiplin dan tanggung-jawab dari organ perusahaan demi menjaga kepentingan para Shareholder dan Stakeholder perusahaan. 4) meningkatkan kontribusi perusahaan (khususnya perusahaan pemerintah) terhadap perekonomian nasional. 5) Meningkatkan investasi nasional. 6) Mensukseskan program privatisasi perusahaan pemerintah.

Tata kelola tersebut diwujudkan dalam satu system pengendalian perusahaan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Suatu struktur yang mengelola hubungan yang harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, rapat umum pemegang saham dan para stakeholder lainnya.
 - 2) Suatu sistem check and balance mencakup pertimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang membatasi munculnya pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan atas asset perusahaan.
 - 3) Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya.
- Indikator dalam penerapan dalam *good corporate governance* ada beberapa yaitu ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit.

b. Prinsip Good Corporate Governance

Prinsip-prinsip dasar dari *good corporate governance*, memiliki tujuan untuk memberikan kemakmuran terhadap kinerja operasional suatu perusahaan. pemenuhan kepentingan seluruh *stakeholders* secara seimbang berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing dalam suatu perusahaan merupakan tujuan utama yang hendak dicapai. Prinsip-prinsip utama dari *good corporate governance* yang menjadi indikator, sebagaimana ditawarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) adalah :

1) Akuntabilitas (accountability)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan bertanggung jawaban sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Dengan kata lain prinsip ini menegaskan bagaimana bentuk pertanggung jawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham. Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan system pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

2) Responsibilitas (Responsibility)

Responsibility (responsibilitas) adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peundang-undangan yang memadai. Dalam hal ini perusahaan mempunyai tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

3) Transparansi (Transparaency)

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi baik dalam

proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat dibandingkan serta mudah diakses oleh pemilik kepentingan lainnya sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak-hak pribadi. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

4) Independensi (Independency)

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi pihak lain. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan perusahaan harus secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan tidak akan ada tekanan atau pengaruh dari pihak manapun dan dapat menghasilkan keputusan yang obyektif.

5) Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)

Fairness yaitu perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak yaitu baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diberlakukan sama atau setara. Dengan adanya aturan main yang jelas, maka pengelolaan perusahaan dapat dilakukan dengan baik.

c. Tujuan dan Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance*

Berdasarkan berbagai definisi atau pengertian *Good Corporate Governance* diketahui ada lima macam tujuan utama *Good Corporate Governance*, yaitu:

- 1) Untuk melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
- 2) Untuk melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholders non pemegang saham.
- 3) Untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
- 4) Untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus atau *boards of directors* dan manajemen perusahaan..
- 5) Meningkatkan mutu hubungan *boards of directors* dengan manajer senior perusahaan.

Kelima tujuan utama diatas mengisyaratkan bagaimana penting hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan badan usaha atau perusahaan sehingga diperlukan tata kelola yang baik. Sedangkan dengan adanya penerapan *corporate governance* dalam suatu perusahaan maka menghasilkan suatu manfaat yang diperoleh, yaitu; 1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional serta lebih meningkatkan pelayanan kepada shareholders, 2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah karena faktor kepercayaan yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*, 3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan 4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan dividen.

d. Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme adalah cara kerja atau totalitas alur kerja yang ditempuh dalam pelaksanaan suatu pekerjaan secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu dalam suatu organisasi. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut.

Mekanisme *good corporate governance* mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer. Ketika terjadi pemisah antara kepemilikan dan pengendalian indikator mekanisme *good corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan dewan direksi. Mekanisme-mekanisme tersebut sebagai berikut:

1) **Kepemilikan manajerial** (persentase saham yang dimiliki manajer)

Kepemilikan manajerial merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial terhadap perusahaan dipandang akan menyelaraskan potensi perbedaan antara pemegang saham liar dengan manajemen, sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manager adalah pemilik juga.

Dengan adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa kinerja keuangan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajemen yang meningkat. Semakin besar proporsi kepemilikan saham manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan proporsi kepemilikan saham yang dikontrol oleh manager dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan sehingga akan menyamakan kepentingan manajemen dan oemegang saham

sehingga berdampak langsung pada keputusan yang akan diambil serta juga akan menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Adapun pengukuran untuk perhitungan dalam penelitian ini yakni menggunakan kepemilikan manajerial yang di mana rumusnya sebagai berikut :

$$KM = \frac{\text{jumlah saham manajemen}}{\text{total saham beredar}} \times 100\% \dots \dots \dots (1)$$

2) **Kepemilikan institusional**
Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh istitusi atau sebuah Lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya). Peranan pemilik institusi dalam *good corporate governance* adalah (a) mengarahkan dan memonitor kegiatan bisnis dimana mereka menanamkan dananya, (b) sebagai sumber informasi perusahaan, dan (c) memiliki hak dan kewajiban suara yang substansial dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

$$KI = \frac{\text{jumlah saham yang di miliki institusi}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

3) **Proporsi dewan direksi.**
Dewan direksi orang yang di tunjuk oleh pemegang saham untuk mewakili kepentingan perusahaan serta memastikan bahwa manajemen di dalam perusahaan bertindak atas nama mereka. Tanggung jawab direksi yaitu bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perusahaan, apanila anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

$$\sum \text{jumlah dewan direksi} \dots \dots \dots (3)$$

4) **Proporsi Dewan komisaris**
Dewan Komisaris merupakan sebuah puncak dari system pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan.

Σ jumlah dewan komisaris(4)

5) Komite Audit

Menurut Agoes dan Ardana (2014:110) komite audit adalah komite tertentu yang membantu tugas pengawasan dewan komisaris dalam pengelolaan perusahaan, salah satunya pengawasan dalam hal pelaporan keuangan perusahaan.

Oleh karena itu, komite audit memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengesahkan penyelidikan terhadap masalah-masalah di dalam lingkungan tanggung jawabnya yang mempunyai tugas membantu dewan komisaris. Dengan demikian komite audit sebagai perwujudan dari implementasi *good corporate governance* berkaitan dengan perancorporate governance tugasnya :

- a. Mengawasi proses penyusunan *corporate governance*.
- b. Memastikan bahwa manajer senior secara aktif mensosialisasikan budaya *corporate governance*.
- c. Memantau perusahaan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- d. Mewajibkan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil evaluasi pelaksanaan *corporate governance* dan temuan lainnya.

Σ jumlah komite audit(5)

Kepemilikan Institusional

Menurut Pasaribu, Topowijaya dan Sri (2016:156) kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham.

Kepemilikan institusional dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{kep.institusional (KI)} = \frac{\text{jumlah saham yang di miliki institusi}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%.$$

.....(6)

Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:

- a. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
- b. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial berarti adalah perbandingan kepemilikan saham manajerial dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar di pasar saham. Menurut Pasaribu, Topowijaya dan Sri (2016:156) kepemilikan manajerial adalah pemilik atau pemegang saham oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial sangat bermanfaat dimana manajer ikut ambil bagian dalam kepemilikan saham perusahaan. Manajer kemudian akan berusaha lebih baik untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga ia pun akan menikmati sebagai keuntungan bagiannya tersebut. Kepemilikan manajerial dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{kep.manajerial(KM)} = \frac{\text{jumlah saham yang dimiliki direksi komisaris dan manajer}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%.....(7)$$

Kepemilikan manajerial akan mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan, karena mereka juga memiliki perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan akan menimbulkan dugaan bahwa nilai perusahaan yang meningkat akibat kepemilikan manajemen yang meningkat. Dalam hal ini akan muncul masalah keageean, dimana agen yang

ditunjuk principal tidak bekerja sesuai dengan tujuan pemegang saham.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan suatu organ perusahaan yang memiliki tugas sebagai pengawas atas kebijakan pengurusan, menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, dan memberikan nasihat kepada direksi untuk kepentingan perusahaan. Fungsi dewan komisaris sendiri melakukan pengawasan, dimana seorang komisaris wajib mempunyai itikad baik, sifat kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberi nasihat kepada direksi untuk kepentingan perusahaan. Dewan komisaris dihitung dengan rumus :

$$\sum \text{jumlah dewan komisaris Independen} \dots\dots(8)$$

Dewan direksi

Dewan direksi menurut (Otoritas Jasa Keuangan, 2014) No.40 tentang perseroan terbatas adalah “direksi adalah Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurus perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud tujuan perusahaan. Dewan direksi dihitung dengan rumus :

$$\sum \text{jumlah dewan direksi} \dots\dots\dots(9)$$

Komite Audit

Komite audit dibentuk oleh dewan direksi yang bertugas melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal. Menurut Arens at al (2010) menjelaskan bahwa *audit committees is a selected number of members of a company’s board of directors whose responsibilities include helping auditors remain independent of management. Most audit committees are made up of three to five or sometimes as many as seven directors who are not a pasrt of company management.* Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa umumnya komite audit itu terdiri dari tiga atau lima kadang tujuh orang yang bukan bagian dari manajemen perusahaan. Tujuan dibentuknya komite audit yaitu untuk menjadi penengah antara auditor dan

manajemen perusahaan apabila terjadi perselisihan.

$$\sum \text{jumlah komite audit} \dots\dots\dots(10)$$

Pengertian Profitabilitas

Menurut Harahap, 2013:304 Rasio Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan yang mendapatkan laba melalui semua kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kehiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Rasio yang dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba disebut juga *Operating Ratio*.

Menurut Zunnati, Suci, dan Subiyati (2019) bahwa kinerja perusahaan yang baik diukur jika memiliki nilai profitabilitas yang tinggi maka itu akan menggambarkan tingginya kemampuan perolehan laba perusahaan. Pada penelitian ini penulis menggunakan salah satu rasio profitabilitas yaitu *Return on Assets* (ROA), dimana *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang menghubungkan antara laba yang diperoleh yang berasal dari kegiatan pokok atau aktifitas perusahaan dengan aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan bagi perusahaan. Dalam menilai rasio profitabilitas, terdapat beberapa indikator penting yaitu

Return on Assets

$$ROA = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{total aset}} \dots\dots\dots(11)$$

ROA adalah rasio profitabilitas dalam mengukur kemampuan laba perusahaan dengan menggunakan aset sebagai aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar ROA, maka akan semakin baik pula produktivitas aset untuk mendapatkan keuntungan (Sofyan,2015:305)

Gross Profit Margin

$$GPM = \frac{\text{laba kotor}}{\text{penjualan}} \times 100\% \dots\dots\dots(12)$$

GNP digunakan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur

kemampuan perusahaan menghasilkan laba melalui persentase laba kotor dari penjualan perusahaan.

Net Profit Margin

$$Net\ Profit\ Margin = \frac{laba\ setelah\ pajak}{penjualan} \dots\dots\dots(13)$$

Net Profit Margin merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar presentase bersih yang diperoleh dari setiap penjualan (Harahap, 2011). Semakin besar rasio ini, maka semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba.

Profit Margin

$$Profit\ Margin = \frac{laba\ sebelum\ pajak}{penjualan} \dots\dots\dots(14)$$

Profit Margin merupakan menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa diinterpretasikan sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya (ukuran efisiensi) pada suatu periode.

Return on Equity

$$ROE = \frac{laba\ setelah\ pajak}{modal\ sendiri} \dots\dots\dots(15)$$

Return On Equity mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan.

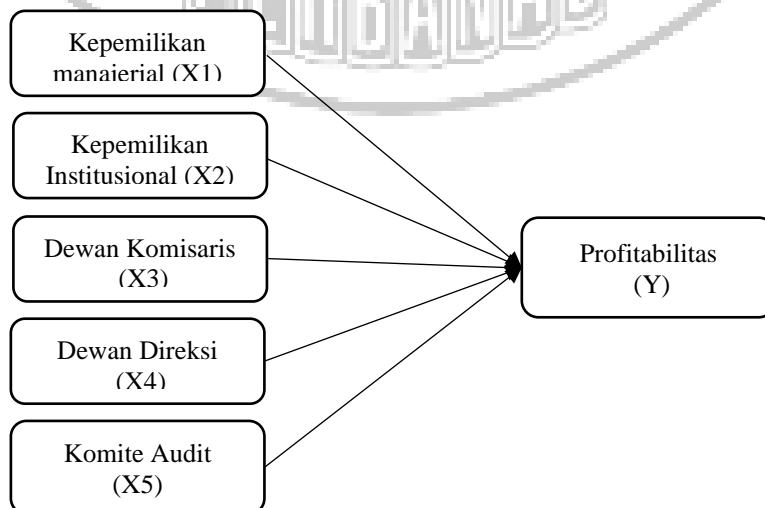
Kerangka Konseptual

Menurut Abdul Hamid (2012 : 120), kerangka penelitian merupakan sintesa

dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan.

Laporan tahunan dijadikan sebagai media komunikasi antara perusahaan dengan *stakeholder* serta pengguna lainnya. Laporan tahunan didalamnya mempunyai kandungan informasi tentang gambaran umum perusahaan terhadap *stakeholder*. Pengungkapan *Good Corporate Governance* pada laporan tahunan perusahaan dapat membantu perusahaan agar menghambat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang nantinya dapat meningkatkan disiplin anggaran, mendayagunakan pengawasan, serta mendorong efisiensi pengelolaan dan keberlangsungan hidup perusahaan, sedangkan mekanisme lainnya adalah agar menekankan pada pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang andal, akurat, serta tepat waktu.

Berdasarkan penjelasan sub bab sebelumnya, maka dapat dibuat kaitan antara Kepemilikan Institusional (KI), Kepemilikan Manajerial (KM), Dewan Direksi (DD), Dewan Komisaris (DK) dan Komite Audit (KA) terhadap Profitabilitas dengan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa hipotesis penelitian sebagai acuan awal pada penelitian ini yang didasarkan teori dan penelitian terdahulu.

- H1: *Good Corporate Governance* yang diprosikan melalui kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap Profitabilitas
- H2: *Good Corporate Governance* yang diprosikan melalui kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap profitabilitas
- H3: *Good Corporate Governance* yang diprosikan melalui Dewan Komisaris berpengaruh terhadap profitabilitas
- H4: *Good Corporate Governance* yang diprosikan melalui Dewan Direksi berpengaruh terhadap profitabilitas
- H5 : *Good Corporate Governance* yang diprosikan melalui Komite Audit berpengaruh terhadap profitabilitas.

METODE PENELITIAN

Identifikasi Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Variabel yang digunakan dalam penelitian dapat diklasifikasikan menjadi: (1) variable independen (bebas), yaitu variabel yang menjelaskan dan mempengaruhi variabel lain, dan (2) variabel dependen (terikat), yaitu variabel yang dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel independen.

Variable dependen adalah atau variable yang di pengaruhi oleh variable independent. Variable dependen dalam penelitian ini adalah Profitabilitas yang

diprosikan dengan *Ratio Return on Assets*. Y1 = Profitabilitas

Variable independent adalah Variable yang mempengaruhi variable lain. Variable independent yang digunakan yaitu Mekanisme *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris dan Direksi, dan komite audit, X1 = Kepemilikan Manajerial, X2 = Kepemilikan Institusional, X3 = Dewan Komisaris dan Direksi serta X4 = Komite Audit

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua Stakeholders. Konsep ini menekankan pada dua hal yaitu, yang pertama pentingnya hal pemegang saham untuk dapat memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya, dan yang kedua kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu serta transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholders.

Variable *good corporate governance* dalam penelitian ini tidak diukur manual oleh peneliti, melainkan melihat dari hasil laporan pengungkapan *good corporate governance* dari tiap tiap perusahaan-perusahaan *go public* non keuangan yang dijasikan sampel pada penelitian ini. Pengukuran kualitas *good corporate governance* dalam perusahaan *go public* non keuangan difokuskan dengan

indikator-indikator yang menjadi variable dalam penelitian ini, yaitu meliputi:

Kepemilikan Manajerial

Kualitas laba yang dilaporkan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial dapat diperoleh dari jumlah saham yang dimiliki oleh direksi dan manajer dibagi dengan jumlah saham yang beredar (Fatima, Ronny dan Budi, 2019). Rumus Kepemilikan Manajerial merujuk pada rumus pertama (1).

Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional dapat dihitung dengan besarnya persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional. Kepemilikan institusional diukur 40 dari persentase antara saham yang beredar, dengan kriteria persentase lebih dari 5% mengindikasikan kemampuannya untuk memonitoring. Rumus Kepemilikan Institusional merujuk pada rumus kedua (2).

Ukuran Dewan komisaris

Ukuran dewan komisaris yaitu jumlah personil dalam anggota dewan komisaris. Ukuran dewan komisaris berdasarkan jumlah anggota dewan komisaris yang duduk sebagai dewan komisaris dalam perusahaan *go public* non keuangan. Rumus dewan komisaris merujuk pada rumus ketiga (3)

Ukuran Dewan Direksi

Ukuran dewan direksi yaitu jumlah personil dalam anggota dewan direksi. Ukuran dewan direksi berdasarkan jumlah anggota dewan direksi yang duduk sebagai dewan direksi dalam perusahaan *go public* non

keuangan. Rumus dewan direksi merujuk pada rumus ketiga (4)

6. Komite audit

Komite audit menurut Agoes dan Ardana (2014:110) adalah komite tertentu yang membantu tugas pengawasan dewan komisaris dalam pengelolaan perusahaan, salah satunya pengawasan dalam hal pelaporan keuangan perusahaan. Komite audit diukur berdasarkan jumlah anggota komite audit yang duduk sebagai komite dalam perusahaan *go public* non keuangan. Rumus Komite Audit merujuk pada rumus keempat (4).

1. Profitabilitas

Dalam penelitian ini profitabilitas perusahaan merupakan variable dependen. Alat analisis dalam pengukuran profitabilitas dalam penelitian ini adalah:

a. Ratio Profitabilitas

Merupakan Ratio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Pada penelitian ini kinerja keuangan diukur dengan :

- Return on Assets (ROA)

Sebab aktivitas operasional perusahaan lebih banyak menggunakan aset. ROA dapat membantu perusahaan untuk mengukur penggunaan aktiva dalam menghasilkan sebuah keuntungan. Rumus ROA merujuk pada rumus kesembilan (9).

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit berpengaruh terhadap profitabilitas. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan perusahaan *Go Public* non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2019 dengan jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 234 sampel. Pada sub bab ini akan dilakukan pembahasan terhadap

masing-masing hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap Profitabilitas perusahaan

Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh pihak manajer di dalam perusahaan. Dengan adanya pihak manajer memiliki saham perusahaan akan dapat menyeimbangkan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer, sehingga pihak manajer dalam mengambil keputusan akan lebih berhati-hati karena akan menyangkut urusan manajer dari setiap keputusan yang diambil. Dari hal tersebut dapat menjadikan manajer perusahaan untuk lebih termotivasi dalam meningkatkan kemampuan dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan H_1 ditolak. Hal tersebut karena dengan adanya kepemilikan manajerial ternyata belum mampu menyelaraskan kepentingan pemegang saham diluar manajemen, dengan kata lain besarnya proporsi saham yang dimiliki oleh pihak manajemen tetap tidak dapat mengurangi konflik keagenan di dalam perusahaan antara pihak manajemen dengan pemegang saham. Sebab besar kecilnya kepemilikan manajerial itu tidak bisa menentukan besar kecilnya profitabilitas. Kemudian proporsi kepemilikan manajerial saham oleh pihak manajemen terbilang kecil sehingga dapat dikatakan penerapan kepemilikan manajerial membantu penyatuan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham dalam meningkatkan profitabilitas yang belum berjalan secara efektif. Hal tersebutlah yang menyebabkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan dasar dari suatu konsep *good corporate governance* di dalam perusahaan, dimana teori keagenan menjelaskan hubungan yang asimetri antara pihak *agen* dan pihak *principal*,

untuk meminimalisir terjadinya suatu *agency problem*, maka dibutuhkan suatu konsep *good corporate governance* yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi perusahaan yang sehat dan mempunyai daya saing yang tinggi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Tjondro *et al* (2011), Azis *et al* (2017) yang menyatakan bahwa variable kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. tetapi tidak sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukhtaruddin *et al* (2019), Zannati *et al* (2019), Fatimah *et al* (2019) yang menyatakan bahwa variable kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.

2. Pengaruh kepemilikan Institusional terhadap Profitabilitas perusahaan

Kepemilikan institusional ini merupakan saham perusahaan yang di miliki oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi badan hukum, institusi luar negeri, dan institusi lainnya. Dengan institusi memiliki saham perusahaan akan dapat mengurangi masalah keagenan karena dengan adanya investor institusional mampu melakukan monitoring keputusan yang di ambil oleh pihak manajer. Investor profesional akan memantau secara profesional perkembangan investasi yang ditambahkan pada perusahaan dan memiliki tingkat pengendalian yang sangat tinggi terhadap sebuah Tindakan manajemen. Maka hal itu akan memperkecil potensi manajemen dalam melakukan kecurangan atau Tindakan manipulasi laba.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan H_2 ditolak. Sebab besar kecilnya kepemilikan institusional itu tidak bisa menentukan besar kecilnya profitabilitas. Alasan karena para investor institusional tidak memberikan peran yang signifikan dalam memajukan perusahaan, dimana mereka

mengandalkan manajemen perusahaan sepenuhnya dalam mengelola perusahaan dan memberikan masukan dalam kebijakan penting.

Teori keagenan merupakan sebuah dasar dari suatu konsep *good corporate governance* di dalam perusahaan, dimana teori keagenan ini menjelaskan hubungan yang asimetri antara *agen* dan *principal*, untuk meminimalisir terjadinya *agency problem*, maka dibutuhkan suatu konsep *good corporate governance* yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi perusahaan yang sehat dan mempunyai daya saing yang tinggi. Penelitian ini tidak searah dengan teori *agency*, dimana kepemilikan institusional ini mampu melaksanakan pengawasan terhadap manajemen perusahaan maka akan terjadi peningkatan yang mempengaruhi laba perusahaan dan berdampak pada profitabilitas perusahaan, sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan mampu menjalankan *good corporate governance* dengan baik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tjondro *et al* (2011), Azis *et al* (2017) yang menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. tetapi tidak sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukhtaruddin *et al* (2019), Zannati *et al* (2019), Fatimah *et al* (2019) yang menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.

3. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap profitabilitas perusahaan

Dewan komisaris merupakan mekanisme yang mengawasi dan memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan, dengan adanya dewan komisaris dalam perusahaan maka akan semakin kuat control internal terhadap profitabilitas perusahaan. Dewan komisaris dapat meminta nasihat dari pihak ketiga atau membentuk komite khusus yang dapat membantu menjalankan tugasnya sesuai prosedur yang ditetapkan.

Dewan komisaris merupakan bentuk perwakilan dari *principal* dalam mengelola perusahaan yang dapat memberikan petunjuk serta mengarahkan, sehingga menciptakan profitabilitas yang baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh dewan komisaris baik dengan jumlah anggota besar atau dengan jumlah kecil kurang kuat untuk dapat berdampak terhadap tinggi rendahnya profitabilitas maka H₃ ditolak. Peran suatu dewan komisaris yaitu menjalankan fungsinya dalam melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan direksi atau manajemen, namun dengan adanya dewan komisaris di dalam perusahaan ternyata belum tentu dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap dewan direksi atau manajemen di dalam perusahaan. Kemudian banyaknya jumlah anggota dewan komisaris yang jumlahnya terlalu besar dapat mengakibatkan kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap manajemen di dalam perusahaan, sebab besarnya anggota dewan komisaris kurang dapat mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi dalam memberikan saran kepada dewan direksi dalam hal pengambilan keputusan. Selain itu jumlah dewan komisaris yang besar dapat mengakibatkan biaya yang dikeluarkan dalam membayar dewan komisaris lebih besar dari pada manfaat yang didapatkan, lalu kualitas dan pengalaman yang dimiliki dewan komisaris lebih penting dari jumlah anggota dewan komisaris. Hal tersebutlah yang menyebabkan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan yang asimetri antara *agen* dan *principal*, untuk menghindari terjadinya hubungan asimetri (*agency problem*) tersebut maka dibutuhkan suatu konsep *good corporate governance* yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi perusahaan yang sehat dan mempunyai daya saing yang tinggi. Teori keagenan ini

menunjukkan keterkaitan antara variable dewan komisaris dengan profitabilitas perusahaan, dimana masalah yang sering dihadapi yaitu konflik kepentingan antara para manajer dengan para pemegang saham dalam mengambil suatu keputusan, masalah ini akan timbul jika para manajer mengabaikan kepentingan para pemegang saham serta dalam menjalankan pengelolaan perusahaan dijalankan secara terpisah dan tidak baik sebagaimana mestinya. Maka hasil ini tidak sejalan dengan *agency* yang menyebabkan dimana jumlah dewan komisaris lebih banyak dapat memperbesar peluang profitabilitas perusahaan yang lebih tinggi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tjondro *et al* (2011), Azis *et al* (2017) yang menyatakan bahwa variable dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. tetapi tidak sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukhtaruddin *et al* (2019), Zannati *et al* (2019), Fatimah *et al* (2019) yang menyatakan bahwa variable dewan komisaris berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.

3. Pengaruh Dewan Direksi terhadap profitabilitas perusahaan

Dewan direksi merupakan suatu organ perseo yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan baik didalam maupun di luar perusahaan. Dewan direksi mengurus perusahaan dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan dengan seimbang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable dewan direksi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan H_4 ditolak. Karena dapat dikatakan bahwa jumlah dewan direksi dalam perusahaan tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya profitabilitas. Dewan direksi juga belum mampu melakukan koordinasi serta pengambilan keputusan yang tepat dalam menjalankan fungsi control yang lebih

baik untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. hal tersebutlah yang menyebabkan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Teori keagenan (*agency theory*) menunjukkan keterkaitan antara variable dewan direksi dengan profitabilitas perusahaan, dimana kebijakan yang telah ditentukan oleh dewan direksi akan dijalankan oleh manajer, yang mana manajer lebih mengetahui tentang hal-hal apa saja yang berada di dalam perusahaan sehingga memungkinkan adanya penyalagunaan wewenang oleh pihak manajer. Sesuai dengan teori keagenan dimana tentang keorganisasian yang menjelaskan bahwa dalam suatu organisasi dapat timbul konflik antara anggota yang dapat mempengaruhi *principal*, maka dari itu dibutuhkan hubungan yang baik dari anggota dewan direksi sebagai *agen* kepada *principal* agar penerapan *good corporate governan* di dalam perusahaan tersebut berjalan dengan baik dan dapat menjadikan perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang sehat yang mempunyai daya saing yang tinggi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tjondro *et al* (2011), Azis *et al* (2017) yang menyatakan bahwa variable dewan direksi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. tetapi tidak sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukhtaruddin *et al* (2019), Zannati *et al* (2019), Fatimah *et al* (2019) yang menyatakan bahwa variable dewan direksi berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.

5. Pengaruh komite audit terhadap Profitabilitas perusahaan

Komite audit merupakan sebagai organ pendukung yang membantu dewan komisaris yang memiliki peran yang penting dan strategis dalam memelihara proses penyusunan laporan keuangan. Tugas komite audit yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghasilkan data keuangan serta

melakukan control internal perusahaan sehingga dapat meminimalisir adanya keuntungan sepihak dari pihak manajemen perusahaan. Tugas komite audit dapat dikatakan baik jika terjadi peningkatan kualitas pada laporan keuangan perusahaan yang berdampak pada profitabilitas perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable komite audit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan H_5 ditolak. Alasannya karena pembentukan komite audit dalam suatu perusahaan hanya didasarkan pada suatu pemenuhan regulasi dan kurang optimalnya komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap manajemen. Selain itu ada kemungkinan bahwa jumlah komite audit yang berada di dalam perusahaan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 55/PJOK.04/2015 yang menyatakan bahwa perusahaan harus memiliki komite audit minimal 3 orang yang dapat dijadikan pedoman untuk menetapkan jumlah komite audit di dalam perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi pengawasan yang dilakukan di dalam perusahaan. kemudian fungsi dari komite audit itu sendiri yaitu untuk menawasi kecurangan bukan untuk meningkatkan laba perusahaan, hal tersebut yang menyebabkan komite audit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan yang asimetri antara *agen* dan *principal*, untuk menghindari terjadinya hubungan asimetri (*agency problem*) tersebut maka dibutuhkan suatu konsep *good corporate governance* yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi perusahaan yang sehat dan mempunyai daya saing yang tinggi. Teori keagenan (*agency theory*) menunjukkan keterkaitan antara variable komite audit dengan profitabilitas perusahaan, dimana masalah yang sering dihadapi yaitu konflik kepentingan antara para manajer dengan para pemegang saham dalam mengambil

suatu keputusan, serta konflik yang sering timbul dalam kecurangan yang dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri tanpa memikirkan kesejahteraan perusahaan. berdasarkan teori *agency* dimana komite audit melakukan control dan pengawasan yang akan menjamin pengelolaan perusahaan yang dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. maka hasil ini tidak sejalan dengan *teori agency* yang menjelaskan dimana jumlah komite audit yang lebih banyak dapat memperbesar peluang profitabilitas perusahaan yang lebih tinggi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tjondro *et al* (2011), Azis *et al* (2017) yang menyatakan bahwa variable komite audit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukhtaruddin *et al* (2019), Zannati *et al* (2019), Fatimah *et al* (2019) yang menyatakan bahwa variable komite audit berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan non keuangan Indonesia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 sampai 2019, dengan tujuan mengetahui Profitabilitas perusahaan pada tahun terbaru.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut; 1) Perusahaan *Go Public* non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan 2019, 2) Menerbitkan laporan keuangan terus menerus dari tahun 2014 sampai dengan, 3) 2019, 4) Perusahaan *Go Public* non keuangan tersebut yang mengungkapkan laporan *Good Corporate Governance* pada tahun 2014 sampai

dengan 2019 dan 5) Memiliki data mengenai kepemilikan manajerial.

Perusahaan *go public* non keuangan tersebut yang mengungkapkan laporan tahunannya dalam bentuk rupiah.

KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh yang ditimbulkan oleh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit terhadap profitabilitas pada perusahaan *Go Public* non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2014-2019. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari ringkasan kinerja perusahaan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit yang ada pada Bursa Efek Indonesia.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan Teknik purposive sampling, dimana perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus diseleksi sesuai kriteria, sehingga diperoleh sampel sejumlah 234. Dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda dengan program SPSS *version 25 for windows*.

Berdasarkan dari hasil data dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan non keuangan. Karena adanya kepemilikan manajerial ternyata belum mampu menyelaraskan kepentingan pemegang saham di luar manajemen, 2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan non keuangan. Karena para investor belum memberikan peran yang signifikan dalam memajukan perusahaan, adanya kecenderungan yang rendah oleh investor mayoritas dalam keberpihakan kepada

manajemen dan tidak mengabaikan kepentingan pemegang saham, 3. Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan non keuangan. Karna dengan adanya jumlah dewan komisaris yang terlalu banyak dapat mengakibatkan kurang optimalnya pengawasan terhadap manajemen, serta sulitnya berkomunikasi dan berkoordinasi dalam memberikan nasihat kepada dewan direksi dalam pengambilan keputusan, 4. Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan non keuangan. Karena dengan adanya dewan direksi belum bisa memberikan solusi dalam memecahkan masalah di dalam perusahaan yang berdampak terhadap profitabilitas, serta tidak dapat lebih mudah menentukan strategi dan keputusan yang diambil yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan dan 5). Komite audit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan non keuangan. Karena fungsi dari komite audit yaitu mengawasi kecurangan atau manipulasi di dalam perusahaan, bukan untuk meningkatkan laba perusahaan.

Keterbatasan

Penelitian ini yang dilakukan masih terdapat beberapa kekurangan yang menjadikan hal tersebut sebagai keterbatasan penelitian. Keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. variable independen yang digunakan dalam penelitian ini seperti dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit yang hanya diukur dengan menggunakan banyaknya anggota saha. Hal itu yang menyebabkan kurang mempresentasikan kondisi yang sebenarnya yang terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh komisaris, 2. Adanya perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan manajerial, 3. Adanya perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan institusional dan Hasil uji F tidak signifikan.

Saran

Dengan adanya keterbatasan penelitian yang telah disampaikan data, maka penelitian memberikan saran untuk penelitian berikutnya, antara lain; 1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperpanjang periode penelitian, sehingga jumlah sampel mampu menghasilkan penelitian yang lebih baik dan 2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau mengganti variable independen yang memungkinkan dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan sehingga pengaruh variable lain di luar model dapat diungkap.

Bagi para pengguna laporan keuangan, khususnya para investor dan kreditur, peneliti ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan melihat kondisi suatu perusahaan dan kemampuan perusahaan sebelum mengambil keputusan bisnisnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi Isa Ansori, Herizon. 2016. Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Rasio Kecukupan Modal Inti (TIER 1) Pada Bank-Bank Kelompok Buku 3 dan Buku 4, *journal of business and Banking* STIE Perbanas Press Volume 7 Nomor 1, May – October 2017.
- Ahmad Yusril Al Human, Ellen Theresia Sihotang (2019). Risiko Usaha Terhadap Rasio Kecukupan Modal Bank Umum Swasta Nasional Devisa *Go Public*, *journal of business and Banking* STIE Perbanas Press Volume 8 Nomor 2, November 2018 – April 2019.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program. IBM SPSS 23* (edisi 8). Universitas Diponegoro. Semarang.
- Harmono (2016). *Manajemen Keuangan* cetakan kelima. Sinar Grafika Offset. Jakarta.
- Inez Febrilia (2016). Pengaruh Risiko Usaha Terhadap CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa, Skripsi sarjana, Tak diterbitkan, STIE Perbanas Surabaya.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Manajemen Risiko, Mengidentifikasi risiko dasar, operasional, dan kredit bank Kesatu.*, PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kasmir, (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Julius R. Latumaerissa. 2014. *Manajemen Bank Umum*. Mitra Kencana Media.
- Kuncoro dan Suhardjono (2012). *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi* Edisi 4. Erlangga. Jakarta.
- Laporan Keuangan Publikasi, Laporan Otoritas Jasa keuangan. (www.ojk.go.id)
- Lukman, — Dendawijaya. (2009). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ni Putu Ayu Ria Agustini, Luh Gede Sri Artini (2018). Pengaruh Profitabilitas, Risiko Kredit, Likuiditas, Dan Efisiensi Operasional Terhadap Kecukupan Modal Pada BPR Kabupaten Klungkung, *e-journal Manajemen Universitas Udayana* Press Volume 7, Nomor 10, 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2020. Jakarta. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. No. 11/SEOJK.03/2018. Tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Kredit
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No 18/POJK.03, 2016. Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18.
In Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
(www.ojk.go.id).

Peraturan Bank Indonesia PBI No
10/15/PBI/2008. “Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum Bank
Umum”. (www.bi.go.id).

Peraturan Bank Indonesia PBI No.
06/10/PBI/2004. “Sistem Penilaian
Tingkat Kesehatan Bank Umum”
(www.bi.go.id).

Peraturan Bank Indonesia PBI No.
11/25/PBI/2009. “Penerapan
Manajemen Risiko Bagi Bank
Umum” (www.bi.go.id).

Peraturan Bank Indonesia PBI No
12/10/PBI/2010. “Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Bank Indonesia”
(www.bi.go.id).

Peraturan Bank Indonesia No.
5/13/PBI/2003 “Posisi Devisa Neto
Bank Umum”. (www.bi.go.id)

PBI No. 17/11/PBI/2015. “Perubahan Atas
Peraturan Bank Indonesia
(www.bi.go.id)

Sugiyono, (2013) Metodologi Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.
(Bandung: ALFABETA).

Taswan. (2010). *Manajemen Perbankan
Konsep , Teknik dan Aplikasi*. Edisi
Kedua. UPP STIM YKPN.
Yogyakarta.

Vaitzhal Rivai 2013, (2013). Commercial
Bank Manajemen Perbankan Dari
Teori Ke Praktik. Jakarta.